

ABSTRAK

Akhmad Syarwani, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, di bawah bimbingan I: Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. Dan II: Dr. Hj. Hayatun Nai'mah, SH. M.Hum. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata kunci: Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai keberadaan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan yang menerbitkan sukuk SBSN yang juga bertindak sebagai wali amanat terhadap investor dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit SBSN. Pada dasarnya Perusahaan Penerbit bukanlah konsep ekonomi Islam, tetapi merupakan hasil adopsi dari pasar modal internasional sehingga tujuan penelitian ini mengenai status keberadaan dalam pelaksanaan penerbitan SBSN Indonesia ini perusahaan penerbit ini perlu dipertanyakan apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian dengan menghimpun peraturan-peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa sebagai sumber primer kemudian mengumpulkan sumber pustaka melalui buku-buku, majalah, arkelil, jurnal dan penelitian lain sebagai sumber data sekunder dan kemudian hasil tersebut akan dideskripsikan secara spesifik mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan rumusan masalah berdasarkan fakta. Kemudian dibuatlah analisis untuk menjawab rumusan mengenai fungsi Perusahaan Penerbit SBSN dan juga sebagai Wali Amanat dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit SBSN sesuai dengan bahan teori-teori yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan pertama bahwa walaupun Perusahaan Penerbit SBSN dibentuk oleh pemerintah tetapi hubungan antara perusahaan penerbit SBSN dengan pemerintah tersebut kewenangan dan tanggung jawabnya sebatas untuk menerbitkan SBSN. Sedangkan fungsi sebagai wali amanat adalah bertindak melakukan kepentingan para investor baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian walaupun pendirian perusahaan penerbit SBSN bukanlah konsep Islam atau hasil adopsi dari pasar modal internasional tetapi dalam prakteknya telah

menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, ikhtikar dan bai'najasy, dan *risywah* juga adanya kepastian hukum, tanggung jawab dan kemaslahatan. Sedangkan penerapan prinsip-prinsip yang memungkinkan tidak sesuai prinsip syariah, yaitu pertama: apabila terjadi gagal bayar oleh pemerintah/emiten kepada investor dikarenakan pemerintah/emiten bangkrut sehingga tidak terpenuhinya pengembalian dana investasi pada saat jatuh tempo sesuai yang telah disepakati di awal. Kedua: apabila terjadi kerugian dan kegagalan perusahaan penerbit SBSN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

ABSTRACT

Akhmad Syarwani, *Analysis of the Implementation of Sharia Principles in State Sharia Securities Issuing Companies (SBSN), under the guidance of I: Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. and II: Dr. Hj. Hayatun Nai'mah, SH. M.Hum. In the Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2020.*

Keywords: Application of Sharia Principles.

This research was backgrounded by the current role of the State Sharia Securities Issuing Companies (SBSN) in issuing Sharia bonds and acting as the investment guarantee agency as well as maintaining sharia principles of the companies. Basically, the issuing companies are not an Islamic economic concept, but it is an adoption of the concept of international capital market. Thus, the purpose of this study was look at the implementation of sharia principles by the State Sharia Securities Issuing Companies.

This study used a normative approach or library law research by collecting primary data sources from laws, government regulations, fatwas and collecting secondary data garnered from books, magazines, articles, journals and other research repositories. The findings were then described specifically in order to produce evidence based data. Furthermore, the outcomes were analyzed and inferenced in accordance with the current research findings and the relevant previous studies.

The findings indicated that the relationship between the issuing companies and the government is still confined to the authority and responsibility of the companies in issuing the sharia securities. Meanwhile, as the investment guarantee agency, these companies act on behalf of the investors' interests both in front of the court and beyond. Although the establishment of the issuing companies was merely an adoption of the international capital market rather than an Islamic economic concept, it has implemented sharia principles in practices such as avoiding the elements of usury, maysir, gharar, ikhtikar and bai'najasy, risywah, legal certainty, responsibility, and benefits. Meanwhile, the implementation of possible principles is not in accordance with sharia principles, namely first: in the event of a default by the government/issuer to investors because the government/issuer is bankrupt so that the return of investment funds at maturity is not fulfilled as agreed at the beginning Second: in the event of loss and failure of the SBSN issuing company in carrying out its duties and obligations.